

MEMAHAMI KEMBALI NASIONALISME INDONESIA

*Bambang Purwanto**

Abstract

Nationalism is a given cultural reality which keeps changing its meaning through out our history. Such changing is partly due to a manipulative exercise by the rulers, partly through socialization of the so called 'national history.' Societal conflict and tention emerged in many part of Indonesia recently has been due to unfinished transformations, yet pursuing the manipulative path of nationalization of nationalism lead us to absurdity of our collective identity. Reconstructing Indonesian historiography is an imperative, whithin which local history should have a fair treatment.

Kata-kata kunci: *Nasionalisme; Identitas Indonesia; Integrasi; Sejarah.*

Di dalam tradisi penulisan sejarah secara umum, istilah nasionalisme bukan sesuatu hal yang baru. Eric Hobsbaw (1991), salah satu sejarawan Inggris terkemuka di abad XX ini di dalam tetraloginya tentang sejarah Eropa menempatkan nasionalisme sebagai salah satu fenomena historis yang sangat penting baik dalam sejarah Eropa maupun dalam kaitannya antara Eropa dengan wilayah lainnya sejak abad ke -18 sampai abad ke -20. Nasionalisme menjadi salah satu pokok bahasan pada setiap periode sejarah yang dibaginya menjadi empat babak, yaitu *the age of revolution, the age of capital, the age of empire, dan age of extremes.*

**) Bambang Purwanto* adalah staff pengajar pada Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Di dalam salah satu pernyataan yang disampaikan oleh *Brotherhood of Young Europe* pada tahun 1834, kelompok ini dengan tegas menyatakan bahwa "rasa kebangsaan itu bersifat sakral, yang merupakan bagian dari misi khusus setiap umat manusia yang terkait erat dengan upaya setiap orang untuk mengisi misi umum kemanusiaannya." Tidak mengherankan jika Ernest Gelner (1983) dan Eric Hobsbaw (1999) mengatakan bahwa nasionalisme adalah bagian dari *high culture* dan *invented tradition*.

Hal di atas menunjukkan bahwa keberadaan nasionalisme seolah-olah sudah merupakan bagian dari takdir dalam proses sejarah umat manusia, termasuk bangsa Indonesia. Nasionalisme bukanlah sesuatu yang *given* dan statis, melainkan sesuatu yang harus dibentuk dan dinamis. Secara historis, tidak ada yang bisa menolak bahwa Indonesia sebagai sebuah entitas kebangsaan merupakan sesuatu yang baru. Nasionalisme Indonesia adalah nilai-nilai yang sengaja diformulasikan sebagai antitesa terhadap dominasi kolonialisme Belanda oleh sekelompok masyarakat yang sebelumnya memiliki identitas masing-masing yang terpisah. Sebagai sebuah ikatan kebangsaan, entitas Indonesia tidak pernah ada sebelumnya dan baru muncul pada awal abad ke-20 serta mencapai puncaknya ketika sebuah bangsa dan negara baru diproklamasikan pada tahun 1945. Sejak saat itu, semua penduduk yang ada di bekas wilayah Hindia Belanda itu kemudian menyebut diri mereka, atau disebut sebagai bangsa Indonesia.

Sebagai individu atau kelompok yang beridentitas Indonesia, secara legal mereka berhak menetap atau mencari rezeki di mana saja di wilayah yang tercakup sebagai Indonesia, dan itu memang telah terjadi selama lebih dari lima puluh tahun sejak kemerdekaan diproklamasikan. Namun akhir-akhir ini identitas keindonesiaan itu tidak mampu menjamin semua warganegara dapat tinggal di seluruh wilayah Indonesia. Laporan tentang Kota Waringin Barat dan Kuala Kapuas menunjukkan terjadinya peningkatan penolakan orang Dayak terhadap etnik Madura, seperti yang juga telah terjadid di Sampit. Kondisi itu menyebabkan etnik Madura yang merupakan para pendatang baru dan pengungsi dari dilarang untuk tinggal di Pangkalanbun, dan bahkan di seluruh Kalimantan Tengah. Tidak kurang dari 16 ribu jiwa dari 40 ribu jiwa penduduk etnik Madura yang ada di Pangkalanbun

telah keluar dari daerah itu untuk menghindari *sweeping* yang terus dilakukan oleh para "prajurit" Dayak.

Peristiwa di atas semakin memperpanjang daftar fenomena yang menunjukkan adanya persoalan dalam identitas Indonesia sebagai bangsa dan keberadaan etnik yang menganggap dirinya sebagai representasi dari mereka yang berhak secara mutlak atas sebuah wilayah tertentu. Setelah banyak orang di Propinsi Aceh dan Irian Jaya tidak lagi merasa diri mereka sebagai bagian dari Indonesia, keinginan untuk melepaskan identitas keindonesiaan dan tuntutan hak mutlak atas sebuah wilayah juga mulai disuarakan oleh mereka yang berada di wilayah lain di Indonesia akhir-akhir ini. Sementara itu pelaksanaan kebijakan otonomi daerah telah menimbulkan euforia yang mengarah pada egoisme etnik atau kedaerahan yang sangat luar biasa, sehingga mendorong baik birokrat maupun masyarakat tidak mampu lagi berpikir secara rasional tentang realitas sebuah negara bangsa. Desa, kecamatan, kabupaten, dan propinsi saling bertikai karena mereka berada pada desa, kecamatan, kabupaten, atau propinsi yang berbeda. Di tempat lain desa bertikai dengan desa, desa dengan kecamatan, kecamatan dengan kabupaten, kabupaten dengan propinsi, dan akhirnya pemerintah daerah dengan negara, yang tidak hanya melibatkan para birokrat melainkan juga menghasilkan konflik terbuka antar masyarakat secara riil. Disintegrasi bangsa menjadi kata yang telah menjadi buah bibir, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Oleh sebab itu muncul pertanyaan sederhana, apa yang terjadi dengan nasionalisme Indonesia, sehingga nilai yang dianggap mampu menahan terjadinya disintegrasi bangsa itu tidak fungsional. Apakah nasionalisme yang dipahami bangsa Indonesia selama ini masih relevan dengan berbagai perubahan yang telah, sedang, dan akan terjadi? Sejauhmanakah dan dalam hal apakah sejarah berperan dalam pemahaman terhadap nasionalisme Indonesia dan munculnya persoalan disintegrasi?

Antara Identitas Etnik dan Identitas Kebangsaan

Secara historis, konflik identitas merupakan salah satu ciri penting dalam kehidupan sebagian besar negara baru yang dibentuk pascakolonial Barat berakhir, sebagai akibat dari tidak adanya

keserasian antara negara dan bangsa seperti yang dikatakan oleh John Saul (1979). Tidak adanya keserasian itu telah menjadi beban berat pada sistem politik nasional, sehingga memunculkan konflik antara negara dengan rakyat dan berdampak sangat buruk terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Dalam situasi seperti itu, legitimasi negara tidak berakar kuat pada rakyat, sehingga sebagian dari mereka beranggapan bahwa negara sebagai lembaga yang terpisah dan asing dari komunitasnya. Walaupun sebagian besar komunitas etnik hidup di dalam wilayah negara yang sama, menurut John Martinussen (1997) mereka sebenarnya tidak memiliki perasaan yang kuat sebagai bangsa yang sama. Proses pembentukan identitas etnik tertentu yang berpotensi belum berakhir, walaupun sebuah negara baru telah dideklarasikan. Bagi komunitas etnik tertentu yang ada di dalam negara baru itu, identitas kebangsaan yang melekat pada negara baru itu dipahami tidak lebih sebagai identitas kebangsaan yang imajiner disamping realitas identitas kebangsaan lain yang juga melekat pada masing-masing komunitas etnik.

Secara teoretik, terdapat dua pendapat tentang keberadaan identitas etnik dan kebangsaan. Kelompok pertama yang melihat secara normatif berpendapat bahwa perbedaan identitas etnik dan kebangsaan merupakan sesuatu yang alami sesuai dengan identifikasi primordial dan loyalitas dari masing-masing kelompok yang memiliki persamaan dan perbedaan. Di dalam pandangan kelompok ini yang diwakili oleh orang seperti Clifford Geertz (1963) dan Bjorn Hettne (1990), sebagian besar negara baru lebih banyak mengandung kategorisasi-kategorisasi etnik daripada bangsa. Sementara itu menurut pendapat kedua, seperti yang disampaikan oleh Ernest Gellner (1983), identitas etnik dan kebangsaan merupakan sebuah fenomena yang secara sosial dan ideologi diciptakan secara sengaja melalui manipulasi simbol, yang biasanya terjadi dalam kompetisi para elite untuk menguasai sumber dan hak. Ketika para elite dari berbagai kategori etnik itu berkompetisi untuk menguasai kesempatan-kesempatan baru yang muncul dari perkembangan masyarakatnya, mereka secara sengaja mendorong terjadinya transformasi etnik untuk membentuk identitas baru di dalam komunitas etnik sebagai cara yang dianggap paling efektif untuk mencapai tujuan. Menurut John Martinussen (1997), ciri-ciri objektif umum seperti agama, bahasa, dan pertalian wilayah hanya menjadi

penting jika digunakan sebagai dasar untuk menciptakan kesadaran dan mobilisasi sosial. Namun menurut Paul Brass (1991), tahapan transformasi etnik berikutnya dari komunitas etnik ke kesadaran terhadap identitas kebangsaan hanya akan terjadi jika memenuhi dua syarat, yaitu adanya kebutuhan terhadap identitas itu disuarakan oleh masyarakat secara keseluruhan dan adanya organisasi tertentu yang mampu mencapai status khusus sehingga dapat menyatakan dirinya mewakili seluruh komunitas.

Brass lebih lanjut menyatakan bahwa transformasi etnik dipahami sebagai sebuah proses yang kompleks dalam pembentukan identitas etnik dan kebangsaan. Dalam konteks politik, kebangsaan tidak semata-mata dihubungkan dengan kebutuhan terhadap sebuah negara yang terpisah. Begitu juga dengan kelompok etnik, identitas itu tidak dapat hanya dikaitkan dengan kebutuhan terhadap perbaikan dan penataan kembali di dalam negara yang telah ada. Ketika sebuah kelompok etnik mulai mengorganisir dan bertindak secara kolektif melawan kelompok lain atau negara, kelompok etnik itu mulai mengalami proses transformasi etnik untuk membentuk identitas komunitas etnik. Proses transformasi etnik dari komunitas etnik menuju kesadaran kebangsaan terjadi apabila komunitas etnik itu membutuhkan tambahan otonomi politik atau negara yang terpisah. Nasionalisme yang mendasari munculnya kesadaran kebangsaan itu merupakan manifestasi dari kontradiksi dan konflik kepentingan daripada sekedar hasil solidaritas antar atau di dalam kelompok.

Dalam proses konsolidasi nasional dan mempertahankan keutuhan teritorial, negara-negara baru itu biasanya menciptakan keseragaman serta membatasi atau bahkan menisbikan keragaman. Negara-negara baru pascakolonial itu sebagian besar dikelola berdasarkan kombinasi antara kekuatan dan kerentanan. Birokrasi sipil dan militer yang diwarisi dari penguasa kolonial telah memberi kekuatan untuk mengelola negara, namun menurut Christopher Clapham (1985) pada saat yang sama kedudukan negara sangat rentan karena birokrasi yang ada tidak terintegrasi dengan komunitas politik di dalam masyarakat. Nasionalisme yang merupakan imajinasi konseptual dari sebuah komunitas dalam membangun solidaritas bersama seperti yang dikatakan oleh Benedict Anderson (1983).

Dalam konteks yang terakhir itu, negara cenderung memaksakan hegemoni tertentu yang diambil dari etnik atau etnik tertentu sebagai sebuah nilai tunggal yang harus dipatuhi oleh kelompok dan komunitas etnik lain atas nama bangsa. Akibatnya, usaha pembangunan sering tidak berhasil. Di beberapa negara seperti dikatakan oleh John Martinussen (1997), sejumlah besar penduduk menolak komunitas politik yang diterapkan oleh negara. Sementara itu di negara-negara yang lain, biarpun mereka mengakui kekuasaan dan legitimasi negara, kelompok dan komunitas etnik tertentu tetap merasakan diri mereka sebagai minoritas atau kelompok yang tertindas. Sebagai reaksi, kelompok dan komunitas etnik ini menuntut kesetaraan politis, pembagian keuntungan ekonomis dan hak yang lebih besar, atau bahkan negara yang terpisah dan bangsa yang merdeka. Akibatnya, konflik identitas tidak dapat dihindari.

Dalam mencapai persatuan dan menjaga kesatuan identitas kebangsaan itu, Eric Hobsbaw (1999) menyatakan bahwa negara biasanya melakukan ideologisasi dan mitologisasi historis melalui kreativitas penulisan sejarah dalam rangka menemukan kesamaan warisan kultural, kesamaan pahlawan, kesamaan norma, kesamaan adat istiadat dan lain sebagainya. Melalui legitimasi terhadap masa lalu juga, identitas kebangsaan yang melekat pada setiap komunitas etnik pada masa prakolonial dan kolonial direduksi sedemikian rupa sehingga seolah-olah negara dan bangsa baru itu dibentuk atas dasar kelompok-kelompok etnik yang tidak pernah mengalami transformasi identitas menjadi bangsa. Di samping legitimasi sejarah, pada tingkat tertentu negara bahkan juga tidak segan-segan menggunakan kekuatan bersenjata untuk mempertahankan keutuhan teritorialnya, biarpun secara historis diketahui bahwa penggunaan militer merupakan sarana yang paling awal atau primitif dari proses pembentukan sebuah negara bangsa.

Sementara itu untuk membangun nasionalisme sebagai sebuah kebudayaan atau wacana yang dipahami masyarakat, diperlukan strategi dan komunikasi tertentu sehingga fungsi ideologisnya dapat terbentuk dan terjaga secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, pendidikan secara langsung menjadi instrumen penting dalam proses sosialisasi nilai nasionalisme kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Dalam proses sosialisasi ini, buku pelajaran merupakan salah satu media

utama untuk membangun konfigurasi nasionalisme yang akan ditanamkan kepada masyarakat. Melalui buku pelajaran dapat dihasilkan definisi fungsional dari nasionalisme, yang kemudian ditransformasikan menjadi sebuah ideologi dan budaya yang seolah-olah harus diterima oleh setiap warganegara. Namun dalam kenyataannya, penafsiran dan persepsi terhadap nasionalisme sebagai sebuah wacana dalam proses pendidikan tidak selalu objektif karena ditentukan oleh banyak faktor, seperti pemahaman historis, latar belakang sosio-kultural dan kepentingan kekuasaan. Berkaitan dengan faktor yang terakhir, tidak mengherankan jika pemaknaan terhadap nasionalisme dalam buku-buku pelajaran dengan mudah ditafsirkan hanya menurut penguasa ketika pendidikan mengalami proses regimentasi. Penguasa seolah-olah menjadi representasi dari bangsa sedangkan identitas lain di luarnya dengan sangat mudah dianggap sebagai sebuah penyimpangan atau perlawanan, baik secara sosial maupun politis.

Indonesia yang Sedang Bertransformasi

Meskipun pembentukan negara Indonesia telah dilakukan lebih dari 56 tahun yang lalu, keserasian hubungan sosial dan politik dalam bentuk konflik identitas etnik dan kebangsaan seperti telah disebutkan di atas masih merupakan salah satu di antara masalah-masalah paling rumit yang dihadapi negara dan masyarakat Indonesia sampai saat ini. Adanya konflik antar elit yang terus berlanjut, pemahaman yang simpang siur terhadap kebijakan otonomi daerah, dan tidak adanya kepastian politik serta hukum dari pemerintah terhadap kebijakan desentralisasi itu semakin memperparah keadaan yang berhubungan dengan Indonesia sebagai sebuah identitas kebangsaan.

Seperti beberapa negara baru lain yang muncul setelah keberhasilannya mengatasi kolonialisme Barat sejak berakhirnya Perang Dunia II, pembentukan negara Indonesia telah dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukannya konsolidasi bangsa. Batas-batas dan negara Indonesia pascakolonial telah dibangun ketika Hindia Belanda muncul sebagai sebuah negara yang berkuasa atas wilayah-wilayah itu tanpa mempertimbangkan kondisi objektif penduduk, persepsi masyarakat mengenai komunitas masing-masing, dan batas-batas riil yang ada sebelumnya. Pada saat pergerakan kebangsaan Indonesia

berkembang di awal abad ke-20, salah satu tugas yang dilakukan adalah menciptakan sebuah bangsa yang kongruen dengan penduduk di wilayah yang telah dipersatukan oleh kekuasaan kolonial itu. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945, salah satu tugas utama dari negara adalah menciptakan fondasi nasional bagi dirinya sendiri, namun sangat rentan terhadap gejolak identitas. Adanya campur tangan negara yang sangat besar dalam proses pembentukan identitas kebangsaan pada negara yang baru itu mengakibatkan nasionalisme yang berkembang adalah nasionalisme negara dan bukan nasionalisme populer yang berakar kuat pada masyarakat Indonesia. Akibatnya, berbagai gejolak etnik dan ideologis telah terjadi di Indonesia sejak awal kemerdekaan. Sebagai reaksi dan bagian dari upaya negara mempertahankan keutuhan batas-batas wilayah yang telah ada, pemerintah yang menganggap dirinya sebagai representasi dari negara cenderung bersikap otoriter dan sentralistik, baik pada masa Presiden Soekarno maupun Soeharto.

Rangkaian peristiwa sejak munculnya pergolakan kedaerahan pada tahun 1950-an, berkembangnya tuntutan otonomi daerah yang luas, adanya keinginan yang semakin kuat dari beberapa daerah atau etnik untuk memisahkan diri dari Indonesia sampai simpang siurnya pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, dapat dilihat sebagai indikasi dari ketidakberhasilan atau belum selesainya proses pembentukan identitas nasional Indonesia. Sebaliknya, kesadaran tentang identitas etnik di berbagai wilayah di Indonesia semakin menguat. Hal itulah yang akhir-akhir ini tercermin pada pernyataan yang dilontarkan baik oleh orang Indonesia maupun orang asing, seperti "akankah Indonesia bertahan," "bubarnya Indonesia," "the end of Indonesia", "Indonesia a country in despair", atau "Indonesia... sebuah permainan tanpa akhir." Semua pernyataan itu secara umum memberi kesan bahwa di Indonesia pada saat ini sedang terjadi konflik identitas kebangsaan dan etnisitas yang berdimensi banyak. Konflik identitas itu akhirnya bermuara pada akan terjadinya perubahan mendasar pada konstruk dan realitas Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara, yang pada tingkat tertentu akan berarti disintegrasi.

Sebagai sebuah realitas politik, dalam perjalanan sejarah Indonesia telah muncul tuntutan referendum atau kemerdekaan seperti telah disebutkan di atas. Persoalan yang terjadi di Propinsi Aceh dan

Propinsi Irian Jaya tidak dapat dijelaskan semata-mata sebagai konflik daerah dan pusat di dalam negara Republik Indonesia dalam pengertian ekonomis dan politis, melainkan juga telah menjadi konflik identitas secara sosial dan kultural yang disimbolkan dalam bentuk konflik antara Aceh atau Papua melawan kolonialisme Indonesia dan Aceh atau Irian melawan imperialisme Jawa. Etnik Melanesia yang merupakan penduduk asli di wilayah Propinsi Irian Jaya, melihat Indonesia yang diwakili oleh pemerintah pusat di Jakarta, birokrasinya, tentara, perusahaan-perusahaan, dan etnik lainnya sebagai unsur asing yang selama ini telah mengeksploitir kekayaan Papua. Dalam konteks yang terakhir ini, satu hal yang perlu diperhatikan bahwa telah terjadi proses transformasi identitas pada kelompok-kelompok etnik di Propinsi Irian Jaya menjadi sebuah komunitas etnik Papua. Padahal secara antropologis di dalam komunitas yang menyatakan dirinya sebagai etnik Papua itu terdapat berbagai etnik yang berbeda sebelumnya. Dalam perkembangan kemudian, komunitas etnik Papua itu mengalami transformasi lebih lanjut yang membentuk kesadaran identitas kebangsaan baru bagi orang-orang Melanesia yang tinggal di Propinsi Irian Jaya sebagai bangsa Papua, yang dianggap sejajar dengan bangsa Indonesia dan menjadi lawan dari segala identitas yang berhubungan dengan Indonesia.

Hal yang hampir serupa terjadi di Propinsi Aceh. Propinsi ini sebenarnya didiami oleh kelompok-kelompok etnik yang berbeda, seperti Aceh, Gayo, Alas, Aneuk Jame, Singkil, Kulet dan lain sebagainya yang memiliki banyak perbedaan dalam identitas sosial dan kultural. Pada awalnya kelompok-kelompok etnik yang berbeda itu sangat sulit untuk dipertemukan sebagai sebuah komunitas etnik, dan mereka hanya memiliki persamaan pada homogenitas keagamaan, yang diwakili oleh Islam sebagai agama mayoritas. Namun pengalaman penduduk di propinsi itu sebagai warganegara yang secara terus menerus mengalami marginalisasi, terutama pada masa Orde Baru telah menimbulkan transformasi etnik yang mengarah pada pembentukan Aceh sebagai sebuah identitas kebangsaan yang dibedakan dari Indonesia bagi seluruh kelompok etnik yang tinggal di Propinsi Aceh. Hal itu secara jelas dapat dibaca pada tuntutan referendum yang disuarakan oleh Sentra Informasi Referendum Aceh atau SIRA. Berbeda dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang

mewakili identitas Aceh lama, SIRA sejak awal muncul sebagai kekuatan yang membangun sebuah identitas Aceh yang baru. Jika hal itu terus berlangsung, maka tidak ada kekuatan politik dan bersenjata yang mampu menahan terjadinya proses transformasi kelompok dan komunitas etnik menuju pembentukan identitas kebangsaan yang baru.

Lebih lanjut, adanya konflik identitas itu menjadi semakin jelas menyusul terjadinya berbagai konflik sosial bermuatan etnik dan agama di berbagai daerah sejak tahun 1990-an sampai saat ini, munculnya persepsi negatif masyarakat lokal terhadap kebijakan transmigrasi yang dilakukan pemerintah pusat, dan berkembangnya kesadaran untuk menuntut ganti rugi atas tanah yang telah digunakan baik untuk pembangunan proyek-proyek pemerintah maupun perusahaan-perusahaan perkebunan serta pertambangan. Bagi komunitas Dayak di Kalimantan misalnya, etnik Madura dianggap tidak berhak tinggal di wilayah yang secara tradisional dikuasai oleh etnik Dayak. Begitu juga hal yang sama dialami oleh etnik Bugis, Makassar, Buton, Toraja, dan Jawa yang harus meninggalkan Propinsi Maluku, Irian Jaya, dan Aceh karena perbedaan-perbedaan identitas yang mereka miliki dibandingkan dengan kelompok etnik setempat. Di sisi lain, transmigrasi baik sebagai bagian dari kebijakan pemerintah atau inisiatif masyarakat sendiri tidak lagi diartikan sebagai perpindahan penduduk dari wilayah yang berpenduduk padat ke wilayah berpenduduk renggang, melainkan telah diartikan sebagai perampasan tanah dan sumber ekonomi penduduk setempat oleh etnik atau bangsa asing. Alasan yang terakhir juga mendorong munculnya kesadaran masyarakat untuk menuntut ganti rugi atau pengembalian tanah yang telah digunakan untuk proyek-proyek pemerintah, perkebunan, pertambangan, dan penebangan hutan. Para penduduk tidak hanya melihat adanya unsur manipulasi ekonomis dari proses pembebasan tanah yang telah dilakukan, melainkan juga persoalan hak penguasaan atas tanah itu baik secara legal maupun politis.

Dari realitas-realitas di atas, ada satu hal yang perlu dicatat bahwa sejarah menjadi salah satu variabel penting, karena baik negara Indonesia maupun masing-masing kelompok dan komunitas etnik telah menggunakan sejarah untuk melegitimasi eksistensinya. Pada saat yang sama, kelompok dan komunitas etnik mempersoalkan manipulasi sejarah yang telah dilakukan atas nama negara dan bangsa Indonesia,

seperti yang dikemukakan oleh orang Aceh menyangkut perang melawan perluasan hegemoni Hindia Belanda sejak 1873 dan orang Papua yang mempersoalkan peristiwa pengibaran bendera Bintang Kejora yang menandai kemerdekaan Papua Barat pada tanggal 1 Desember 1961. Sementara itu sebaliknya, kelompok dan komunitas etnik dianggap telah mengingkari realitas sejarah dari keberadaan mereka sebagai bagian dari identitas nasional Indonesia, dan secara historis cakupan wilayah Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah seluruh wilayah Hindia Belanda yang terdiri dari berbagai kelompok dan komunitas etnik, termasuk Aceh dan Papua. Dalam konteks yang lain, sejarah juga digunakan oleh masing-masing etnik untuk melegitimasi keberadaan dan kekuasaan mereka atas suatu wilayah tertentu. Bagi kelompok etnik Madura, keberadaan mereka di Kalimantan dilegitimasi dengan sejarah kehadiran mereka di pulau itu sejak tahun 1902, jauh sebelum konsep kebangsaan Indonesia dirumuskan. Namun bagi kelompok etnik Dayak, legitimasi historis yang dikemukakan oleh etnik Madura itu tidak cukup kuat untuk mendukung hak mereka atas tanah Kalimantan, karena sebagian besar etnik Madura yang mereka persoalkan itu adalah para pendatang baru setelah tahun 1950-an.

Sejarah dan Legitimasi Kesadaran Kebangsaan Indonesia

Salah satu kekuatan rekonstruksi sejarah terdapat pada kemampuannya untuk meyakinkan, mempesonakan, menyenangkan membangun mimpi, namun sekaligus juga untuk menyiksa memutarbalikkan kebenaran, dan menipu. Sejarah menjadi sebuah alat legitimasi yang sangat ampuh untuk membangun sebuah wacana yang akan menjadi nilai dasar untuk menentukan sikap, kesadaran dan kekuasaan. Kekuatan legitimatif sejarah itu menjadi sangat penting pada saat masyarakat sedang mencari identitas diri atau ideologi seper nasionalisme. Seperti dikatakan oleh Eric Hobsbaw (1999), sejarah merupakan bahan mentah bagi ideologi nasionalis, etnik, atau fundamentalis, sama seperti opium menjadi bahan mentah bagi ketergantungan heroin.

Oleh sebab itu tidak mengherankan jika Soekarno dalam pidato pembelaannya di depan pengadilan pada tahun 1930 mengungkapkan tentang pentingnya sejarah bagi perjuangan nasionalisme Indonesia

Menurut Soekarno, hanya melalui kesadaran tentang adanya masa lampau yang besar, masa kini yang gelap, dan masa depan yang bersinar "yang akan bisa menjadikan kembang jayakusuma yang menghidupkan kembali nasionalisme rakyat yang layu." Soekarno lebih lanjut menyatakan bahwa "rakyat yang demikian kebesarannya hari dulu itu, pasti cukup kekuatan untuk mendatangkan hari kemudian yang indah pula." Hal serupa diungkapkan oleh Muhammad Yamin, yang seperti juga Soekarno mengangkat kebesaran sejarah kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Nusantara pada masa pra-kolonial dan perjuangan para tokoh di berbagai daerah melawan kolonialisme dan imperialisme Barat sebagai legitimasi historis bagi nasionalisme Indonesia. Adanya kebanggaan terhadap kebesaran Indonesia yang satu di masa lampau itu, merupakan salah satu alasan yang mendorong Sutjipto Wirjosuparto menolak dengan tegas pendapat C.C. Berg yang meragukan kebenaran data yang dikemukakan Prapanca tentang kebesaran Majapahit. Pendapat C.C. Berg itu sekaligus dianggap bermaksud "mentorpedir cita-cita kesatuan Indonesia [nasionalisme Indonesia]."

Jika masa lampau yang megah itu tidak ada sebagai sebuah kenyataan, maka orang dapat menemukan sendiri masa lalu yang tepat untuk kepentingan itu. Usaha merekonstruksi masa lalu itu tidak selamanya harus dilakukan melalui kebohongan fiktif atau menciptakan fakta sendiri, melainkan dengan cara melakukan generalisasi terhadap fakta sejarah yang sebenarnya unik dan hanya berlaku untuk konteks tertentu saja. Dalam hal ini yang terjadi adalah anakronisme historis, bukan sekedar persoalan ada atau tidaknya bukti atau fakta historis. Sejarah sebagai realitas masa lalu telah mengalami ideologisasi untuk kepentingan legitimasi politis dan sekaligus kultural.

Adanya kenyataan konseptual di atas tentu saja menimbulkan pertanyaan tentang kebenaran rekonstruksi sejarah Indonesia yang berkaitan dengan nasionalisme Indonesia. Jika Soekarno menyatakan bahwa Indonesia pernah merdeka sebelum datangnya kekuasaan Barat, apa, siapa, dan dimana yang dimaksud Soekarno dengan Indonesia? Keraguan historiografis itu kemudian memacu pertanyaan lain tentang kebenaran pemahaman terhadap nasionalisme Indonesia sebagai sebuah wacana yang dipahami sejak masa pergerakan nasional sampai saat ini. Jika Sartono Kartodirdjo (1982) menyatakan bahwa nasionalisme merupakan fenomena atau ideologi modern yang muncul

pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 sebagai reaksi terhadap kolonialisme dan imperialisme Barat, mengapa akar historis nasionalisme Indonesia selalu dikaitkan dengan perlawanan terhadap VOC, Majapahit, Sumpah Palapa Maha Patih Gajah Mada, dan bahkan Sriwijaya? Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah, sejauhmana cara pandang yang mengalami ortodoksi nasionalis itu berpengaruh terhadap rekonstruksi masa lalu Indonesia? Akhirnya, jika nasionalisme Indonesia pada masa pergerakan nasional sampai revolusi setelah kemerdekaan diproklamasikan merupakan antitesis atau konti ideologi terhadap kolonialisme dan imperialisme Belanda, apakah pemahaman yang sama tentang nasionalisme Indonesia masih relevan dengan Indonesia yang telah merdeka?

Bagi tokoh nasionalis seperti Soekarno dan Yamin, Indonesia baik sebagai sebuah kesatuan kultural, historis dan bahkan politik diyakini telah ada jauh sebelum pengaruh kekuasaan Barat masuk ke Nusantara. Walaupun dalam substansi dan pemahaman yang berbeda pendapat yang serupa juga disampaikan oleh Hamka. Jika Yamin dan juga Soekarno lebih menekankan pada masa lalu yang gemilang di sekitar kerajaan-kerajaan Hindu-Budha untuk menunjukkan masa lalu Indonesia, Hamka memahami keberadaan Indonesia berkaitan dengan sejarah Islam di kepulauan Nusantara ini.

Pergerakan nasional Indonesia melawan kolonialisme Belanda telah melahirkan rekonstruksi sejarah yang ingin mengatakan bahwa secara historis Indonesia dan Belanda atau Barat pada prinsipnya adalah sejajar. Seperti dikatakan oleh Mohammad Ali (1963), sejarah Indonesia berfungsi "membangkitkan jiwa perjuangan dan memperkokoh kehormatan pada diri sendiri sebagai rakyat, dan sekaligus menghilangkan rasa rendah diri kita di hadapan Belanda." Demikian menunjukkan adanya kesatuan Indonesia di masa lampau, kata "Indonesia" menjadi satu-satunya label untuk menyatakan masa lalu dari wilayah-wilayah yang ada di Nusantara, khususnya yang tercakup sebagai Hindia Belanda. Oleh karena itu menurut Yamin dan Soekarno, yang ada hanya sejarah Indonesia, tidak ada sejarah daerah. Berdasarkan cara pandang seperti itu, Yamin mengatakan bahwa "Diponegoro bukan hanya sebagai pahlawan yang melawan ambisi kolonial Belanda tetapi juga seorang pemersatu Indonesia yang potensial." Hal yang sama juga dilabelkan Yamin pada patih Majapahit

Gajah Mada, tokoh yang sebenarnya telah menghalalkan segala cara untuk memperluas wilayahnya. Satu hal lain yang perlu dicatat, pengakuan terhadap eksistensi Indonesia di masa lalu itu ternyata juga didukung oleh penulis beraliran Marxis seperti Tan Malaka. Walaupun di dalam tulisannya Tan Malaka lebih menekankan pada aspek penindasan kelas dan yang dilakukan oleh orang asing, secara mudah dapat dibaca bahwa di dalam tulisannya Tan Malaka ingin mengatakan bahwa rakyat yang tertindas pada masa pra-kolonial itu adalah bangsa Indonesia dan yang menindas adalah bangsa "Hindu dan Indo-Hindu serta Arab dan Indo-Arab."

Akibatnya, cara pandang yang mengalami ortodoksi nasionalis itu kemudian sangat berpengaruh terhadap buku pelajaran sejarah yang ditulis setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, seperti buku standar pertama yang ditulis oleh Sanusi Pane. Walaupun kemudian Mohammad Ali menyadari bahwa sejarah Indonesia ditulis terlalu didasarkan pada kebencian kepada Belanda dan oleh sebab itu perlu diungkapkan arti sosial dari masa lalu itu, semuanya sudah terlambat karena tokoh-tokoh seperti Ken Arok, Gajah Mada, Pattimura, Imam Bonjol atau Panglima Polim telah disejajarkan dengan Kartini, Soekarno, Hatta, Leimena, atau Bung Tomo dalam perjuangan nasional Indonesia. Sementara itu, mereka yang hidup di kerajaan Mataram, Singasari, Majapahit, Aceh, Bone atau Palembang, telah dianggap menjadi satu dengan masyarakat yang mendukung kesadaran kebangsaan Indonesia pada abad ke-20.

Namun dari tulisan Mohammad Hatta (1953), dapat diinterpretasi bahwa melabelkan kata Indonesia pada setiap kenyataan yang terjadi pada masa kerajaan-kerajaan tradisional merupakan sebuah kekeliruan. Dalam salah satu tulisannya di *Daoelat Rakjat* pada tahun 1932, Hatta menganggap pernyataan tentang adanya "demokrasi Indonesia" yang akan dijadikan sebagai dasar bagi Indonesia yang merdeka sebagai sebuah semboyan yang kosong. Bagi Hatta, yang ada adalah "Desa-demokrasi" tetapi tidak ada "Indonesia-demokrasi."

Walaupun sebenarnya di dalam tulisannya Hatta lebih menekankan pembicaraan tentang ada tidaknya demokrasi bukan ada tidaknya Indonesia di masa lalu, pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam tulisan itu secara jelas menyiratkan bahwa Indonesia sebagai sebuah kesatuan nilai dan politik belum menjadi sebuah kenyataan

sejarah pada masa kerajaan-kerajaan tradisional. Sementara itu praktek kekuasaan yang berlaku pada masa kerajaan-kerajaan feodal bukan merupakan nilai ideal bagi Indonesia yang merdeka. Hal ini menjadi penting untuk disampaikan, karena seperti dijelaskan oleh Sartono Kartodirdjo bahwa nilai-nilai demokrasi dan nasionalisme dapat dikatakan seperti dua sisi dari satu mata uang yang mendorong perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Seperti juga nasionalisme, maka demokrasi dalam konteks kekuasaan politik kenegaraan merupakan fenomena baru bagi masyarakat pada waktu itu. Hal itu berarti, akar nasionalisme Indonesia pada masa pergerakan nasional harus dicari pada proses demokratisasi yang terjadi seiring dengan munculnya kelas sosial baru di dalam masyarakat dan rasionalisasi terhadap ikatan primordial pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang telah menimbulkan sebuah kesadaran baru di dalam masyarakat. Dalam konteks inilah keinginan Kartini sebagai "orang Jawa" agar kesempatan beasiswa ke Belanda yang diberikan kepadanya digantikan oleh Salim sebagai "orang Minangkabau" dapat dijelaskan. Kesadaran diri sebagai sesama warga Hindia Belanda atau sebagai pribumi telah tumbuh, yang kemudian menjadi dasar bagi terbentuknya kesadaran kebangsaan Indonesia.

Berdasarkan kenyataan itu, adanya usaha menghubungkan Sriwijaya, Majapahit, Sumpah Palapa, atau bahkan Pattimura atau Diponegoro dengan nasionalisme Indonesia merupakan sebuah rekonstruksi historis yang akan mudah terjebak pada anakronisme. Walaupun wilayah kekuasaan Sriwijaya mencakup wilayah yang sekarang dikenal sebagai Indonesia, dalam konteks sejarah objektif, apa yang terjadi berkaitan dengan Sriwijaya bukan merupakan representasi dari nasionalisme melainkan bagian dari sebuah ekspansi kolonial yang ingin membangun sebuah imperium. Hal serupa dapat digunakan untuk menjelaskan Majapahit atau Gajah Mada. Jika ditulis dari perspektif sejarah lokal, Sumpah Palapa yang dikemukakan oleh Gajah Mada secara mudah dikaitkan dengan kolonialisme dan imperialisme Majapahit atau Jawa. Sementara itu walaupun perlawanan Pattimura dan Diponegoro sama seperti pergerakan nasionalisme Indonesia pada abad XX yang ditujukan kepada kekuatan asing, melabelkan perlawanan itu sebagai "proto" (yang pertama atau yang terdahulu -nasionalisme Indonesia), seperti yang dikemukakan Sartono Kartodirdjo (1992) dalam

bukunya *Pengantar Sejarah Indonesia Baru. Sejarah Pergerakan Nasional*, melalui pendapat itu dapat dianggap dengan mudah telah terjadi anakronisme yang cukup serius secara metodologis dalam rekonstruksi sejarah Indonesia.

Kritik serupa dapat juga ditujukan pada konsep "integrasi" yang dikemukakan oleh Sartono. Menurut Sartono telah terjadi "proses integrasi [yang] secara lambat laun dengan segala pasang surutnya berkembang ke arah perwujudan unit geopolitik yang semakin mendekati kesatuan wilayah dewasa ini" sejak tahun 1500. Ada kesan yang sangat kuat bahwa penggambaran konsep integrasi seperti itu tidak memiliki perbedaan prinsipil secara paradigmatis dengan apa yang telah dikemukakan oleh Yamin atau Soekarno tentang kesatuan Indonesia. Kecuali pendekatan multidimensional dari sejarah struktural yang memang sangat penting dan perbedaan pada batas waktu awal dari proses integrasi, perspektif historis yang dibangun oleh Sartono dapat dikatakan hanya merupakan pengilmiah terhadap wacana tentang Indonesia seperti yang telah dikemukakan penulis lain tanpa mampu mengubah secara paradigmatis proses terbentuknya Indonesia. Satu hal yang perlu dicatat bahwa proses integrasi pembentukan sebuah kesatuan geopolitik seperti yang dikemukakan oleh Sartono telah terjadi bukan hanya sejak tahun 1500 namun bahkan dapat ditarik jauh ke belakang pada beberapa abad sebelumnya, seperti telah digambarkan dengan baik dalam studi yang dilakukan oleh Anthony Reid (1999). Jika konsep integrasi tetap ingin dipertahankan, seharusnya Sartono juga memasukkan fakta sejarah dari apa yang telah dilakukan oleh Sriwijaya, Majapahit, Bugis-Makassar, atau kerajaan-kerajaan lainnya sebagai bagian dari proses pembentukan kesatuan geopolitik kewilayahan Indonesia seperti yang dikenal saat ini, bukan hanya terbatas pada Islam dan pengaruh Barat. Jika itu terjadi, seperti telah disebutkan di atas, tentu saja akan sangat mudah mengatakan bahwa tidak ada perbedaan paradigmatis antara Sartono dengan penulis lainnya dalam memahami proses terbentuknya identitas kebangsaan Indonesia.

Dalam pandangan yang lebih kritis terhadap wacana historiografi Indonesia selama ini yang didasarkan pada nasionalisme Indonesia itu, pertanyaan David Henley (1996) tentang berbagai organisasi kedaerahan yang muncul pada awal abad ke-20 baik sebagai

representasi dari nasionalisme Indonesia maupun bentuk perkembangan nasionalisme pada masing-masing wilayah menjadi sangat relevan untuk memahami nasionalisme Indonesia di masa depan. Penelitian yang dilakukan David Henley tentang Minahasa menunjukkan adanya kesadaran yang sangat besar di dalam bangsa Minahasa untuk mengembangkan nasionalisme Minahasa sebelum mereka menjadi bagian dari perjuangan nasionalisme Indonesia. Pendalaman terhadap apa yang telah dikemukakan oleh Henley sangat penting, karena di Jawa para anggota Boedi Oetomo dan kemudian "Panitia Nasionalisme Jawa" yang didirikan pada tahun 1908 sangat menyadari tentang diri mereka sebagai bangsa Jawa. Selain sampai tahun akhir 1910-an dan awal 1920-an pun, para pemu Sumatra seperti Bahder Djohan, Mohammad Amir, dan bahkan Muhammad Yamin sebagai aktivis *Jong Sumatranen Bond* tetap menentang Sumatra, bukan Indonesia sebagai tanah air mereka tercinta.

Kenyataan itu tentu saja menimbulkan pertanyaan tentang pemahaman selama ini secara historis tentang konsep 'nasionalisme lokal' atau 'nasionalisme regional' sebelum terbentuknya 'nasionalisme Indonesia.' Jika proses historis dari pembentukan nasionalisme Indonesia merupakan proses evolusi dari nasionalisme lokal ke nasionalisme regional, maka nasionalisme Indonesia dapat diartikan sebagai "nasionalisme nasional." Padahal seperti yang dikemukakan oleh David Henley, gerakan yang terjadi di Minahasa "lebih bersifat nasional daripada regional, dan merupakan representasi dari titik puncak dan sekaligus awal dari proses pembentukan sebuah bangsa [Minahasa]." Ironisnya, di dalam historiografi Indonesia perkembangan "nasionalisme nasional" Minahasa, Pasundan Sumatra, atau Jawa telah direduksi dan dilebur dalam perkembangan nasionalisme Indonesia. Padahal sebagai sebuah realitas, apa yang mereka lakukan pada saat tertentu tidak ada kaitannya dengan nasionalisme Indonesia atau mengidentifikasi diri sebagai bangsa Indonesia. Baru dalam perkembangan berikutnya setelah terjadi berbagai perubahan, konsep Indonesia sebagai sebuah bangsa dan kemudian negara muncul baik sebagai paradigma politik maupun sebagai kenyataan sosio-kultural. Pengalaman Muhammad Yamin dapat dijadikan contoh bagaimana proses "menjadi Indonesia" ini berlangsung. Didalam sajaknya *Tanah Airku*, Yamin secara jelas

mengidentifikasi dirinya sebagai "orang Sumatera" setelah sebelumnya ia merasa dirinya sebagai "orang Minangkabau." Namun pada tahun 1928 di dalam tulisannya *Indonesia, Tumpah Darahku*, Yamin telah berubah menjadi "orang Indonesia" dan Indonesia telah menjadi tanah airnya. Hal-hal di atas sekali lagi membuktikan bahwa sebagai salah satu elemen dari kebudayaan, nasionalisme itu bukanlah sesuatu yang statis melainkan terus berubah.

Memahami Kembali Identitas Indonesia

Dalam konteks politis, apa yang telah dilakukan Muhammad Yamin, Soekarno, Sanusi Pane, atau bahkan Sartono Kartodirdjo tentu saja dapat dengan mudah dipahami. Perjuangan politik kebangsaan Indonesia pada waktu itu memerlukan legitimasi untuk membangun nasionalisme sebagai ideologi. Oleh karena itu, anakronisme historis bukan isu utama yang perlu diperdebatkan. Sementara itu, anakronisme dalam penulisan sejarah setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tidak lain merupakan akibat dari historiografi yang didasarkan pada nasionalisme, walaupun secara metodologis telah terjadi pencanggihan yang luar biasa dalam ilmu sejarah sejak diperkenalkannya pendekatan multidimensional atau analisis struktural. Namun pertanyaannya adalah, apakah generasi mendatang akan terus tergantung pada cara pandang sejarah yang sama?

Deskripsi di atas telah membangun kesadaran baru bahwa anakronisme yang ada selama ini sangat sulit untuk dapat terus diterima. Rekonstruksi sejarah dari nasionalisme Indonesia di masa depan tidak lagi terikat pada perlawanan terhadap kolonialisme atau patriotisme mempertahankan kemerdekaan sebagai sebuah paradigms, namun bagaimana memahami identitas keindonesian sesuai dengan perubahan yang terjadi. Oleh sebab itu, secara historis perkembangan nasionalisme Indonesia harus dilihat lebih rasional dan objektif sebagai sebuah proses. Keberadaan nasionalisme Indonesia akan dapat dimengerti dan dihargai jika proses pembentukannya direkonstruksi secara sejajar dengan perkembangan "nasionaslisme nasiona," di berbagai wilayah yang kemudian dikenal sebagai Indonesia. Dalam konteks ini, rekonsturksi sejarah tidak melakukan penyeragaman

melainkan menggambarkan keragaman yang bermuara pada kesadaran untuk menjadi bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, sejarah Indonesia harus dibangun dari perspektif sejarah daerah atau lokal. Hal itu berarti, konsep *outonomous history* masih tetap relevan bagi penulisan sejarah Indonesia, terlepas dari adanya kritik seperti yang dilontarkan oleh Kuntowijoyo.

Pemutusan Sriwijaya atau Majapahit dari proses perkembangan nasionalisme Indonesia tidak akan menghilangkan arti penting dua imperium itu. Begitu pula adanya pandangan tentang Majapahit sebagai kekuasaan kolonial atau Gajah Mada sebagai pendukung imperialisme jika dilihat dari perspektif sejarah lokal, tidak akan menghilangkan kebesaran keduanya dalam sejarah pada masanya. Memunculkan "nasionalisme nasional" di berbagai wilayah dalam perspektif sejarah lokal juga tidak akan menghilangkan makna keindonesiaan secara historis. Sebaliknya, keberanian untuk menggambarkan proses perkembangan "nasionalisme nasional" di wilayah-wilayah itu dan "nasionalisme Indonesia nasional" akan membuka pemahaman secara paradigmatis berdasarkan sejarah bahwa terbentuknya identitas nasional sebagai Indonesia merupakan sebuah kesadaran kolektif dari mereka yang sebelumnya telah terlebih dahulu memperjuangkan "nasionalisme nasionalnya" yang didasarkan pada ikatan tertentu, terutama ikatan primordial. Sejarah telah membuktikan bahwa munculnya kesadaran kolektif itu bukan merupakan sebuah produk dari prinsip nasionalisme primitif yang menggunakan kekerasan, kekuatan bersenjata atau pemihakan semu karena hanya sekedar kesamaan ikatan primordial tertentu, melainkan sebagai sebuah hasil dari pilihan yang rasional untuk bersatu dalam konteks keragaman.

Secara historis dapat dikatakan bahwa "nasionalisme Indonesia nasional," ketika Indonesia diproklamasikan sebagai bangsa dan negara yang merdeka belum mengalami rasionalisasi, deprimordialisasi, dan demokratisasi secara menyeluruh. Kenyataan itu tercermin dengan jelas pada konstitusi negara Republik Indonesia pertama, yang salah satu ayatnya menyebutkan bahwa "Presiden ialah orang Indonesia asli." Kalimat "orang Indonesia asli" secara jelas menunjukkan berkembangnya prinsip otoritarian, anti demokrasi, pengingkaran terhadap kemajemukan sosio-kultural dari masyarakat serta wilayah yang kemudian menjadi negara Indonesia yang merdeka, dan adanya

pemahaman yang sempit terhadap nasionalisme. Kalimat itu hanya cocok bagi bangsa yang hidup dalam wacana darurat dan masih melihat kekuasaan kolonial sebagai ancaman riil, karena kalimat "orang Indonesia asli" akan digunakan sebagai perisai untuk melindungi diri dari kembalinya "orang asing" sebagai penguasa politik.

Hal di atas juga menunjukkan bahwa proses perkembangan "nasionalisme Indonesia nasional," belum selesai ketika kemerdekaan diproklamasikan. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk terus mempertahankan secara terus menerus pemahaman tentang nasionalisme Indonesia yang hanya cocok untuk perjuangan melawan eksistensi kekuasaan kolonial. Nasionalisme Indonesia harus didefinisikan atau diformulasi kembali dan sekaligus diperlukan dekonstruksi historiografis serta perubahan konstitusi negara. Satu hal yang harus dicatat bahwa secara historis dan konstitusional kata "persatuan dan kesatuan" atau bahkan *Bhineka Tunggal - Eka* lebih banyak diartikan selama ini sebagai perlunya keseragaman. Padahal dua kalimat di atas lebih pantas diartikan sebagai pengakuan terhadap keragaman dan sepakat untuk berbeda dalam sebuah kesadaran kolektif atas nama Indonesia.

Akhirnya, berdasarkan paparan di atas terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai agenda selanjutnya. *Pertama*, jika benar argumen bahwa Indonesia sedang mengalami proses disintegrasi karena meningkatnya kesadaran identitas etnik dan memudarnya nasionalisme Indonesia, maka meningkatnya fenomena konflik identitas harus menjadi keprihatinan semua pihak yang peduli terhadap keberlangsungan identitas Indonesia dan identitas etnik di masa depan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai genesis dan proses terbentuknya nasionalisme Indonesia dan nasionalisme etnik merupakan sebuah imperatif untuk menemukan solusi alternatif dari konflik yang terjadi. *Kedua*, jika konflik identitas yang terjadi pada periode pascakolonial bertalian secara sistematis dengan kreativitas penulisan sejarah yang menyangkut ideologisasi dan mitologisasi masa lalu juga terjadi di Indonesia, maka pertalian sistematis antara keduanya perlu dikaji dan diungkapkan untuk menemukan strategi solusi konflik dan menghindari disintegrasi Indonesia dengan tetap mengakui keberadaan etnik. *Ketiga*, apabila kesadaran kebangsaan yang merupakan sebuah hasil kreasi komunitas etnik yang memerlukan

otonomi politik tambahan atau negara yang terpisah sebagai sebuah kesengajaan yang dilakukan oleh para elite, maka pemahaman terhadap realitas historis dari pertalian antara berbagai aspek yang terkait akan dapat menjelaskan intensitas dari akibat terjadinya transformasi etnik dan kesadaran kebangsaan. Lebih dari semua itu, persepsi masyarakat Indonesia terhadap keberlangsungan identitas Indonesia dan identitas etnik perlu juga diketahui dalam rangka memahami arah transformasi etnik dan kesadaran kebangsaan Indonesia di masa depan, dan tentu saja diharapkan mampu mengatasi terjadinya disintegrasi.***

Daftar Pustaka

- Anderson, Benedict, 1983. *Imagined Communities*. London: Verso.
- Brass, Paul, 1991. *Ethnicity and Nationalism. Theory and Comparison*. New Delhi: Sage Publication.
- Clapham, Christopher, 1985. *Third World Politics. An Introduction*. London: Croom Helm.
- Geertz, Clifford, 1963. *Old Societies and New States*. New York: Free Press.
- Gellner, Ernest, 1983. *Nations and Nationalism*. Oxford: Basil Blackwell.
- Henley, D.E.F., 1996. *Nationalism and Regionalism in a Colonial Context. Minahasa in the Dutch East Indies*. Leiden: KITLV Press.
- Hettne, Bjorn, 1990. *Development Theory and the Three Worlds*. Essex: Longman.
- Hobsbaw, Eric J., 1991. *Nations and Nationalism Since 1780: Programme, Myth, Reality*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hobsbaw, Eric, 1999. *On History*. London: Abacus.
- Martinussen, John, 1997. *Society, State and Market. A Guide to Competing Theories of Development*. London: Zed Book.
- Mohammad Hatta, 1953. *Kumpulan Karangan*. Jakarta: Penerbitan dan Balai Buku Indonesia.

- Moh. Ali, 1963. *Perjuangan Feodal*. Bandung: Ganaco.
- Reid, Anthony, 1999. *Charting the Shape of Early Modern Southeast Asia*. Chiang Mai, Silkworm Books.
- Sartono Kartodirdjo, 1982. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia. Sebuah Alternatif*. Jakarta: Gramedia.
- Sartono Kartodirdjo, 1992. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500 - 1900. Dari Emporium Sampai Imperium*. Jakarta: Gramedia.
- Sartono Kartodirdjo 1992. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru*. Jilid I-T. *Sejarah Pergerakan Nasional. Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*. Jakarta: Gramedia.
- Saul, John, 1979. *The State and Revolution in Eastern Africa*. London: Heinemann.